BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu negara berkembang, Negara Republik Indonesia sampai saat ini masih giat melaksanakan pembangunan di berbagi sektor. Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur baik secara spiritual maupun material. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam wadah negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah lebih baik di segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang dilakukan berdasarkan rencana guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan mengandung arti yang luas, yaitu pembangunan fisik material dan mental spiritual. Pelaksanaan pembangunan nasional secara terstuktur merupakan tugas pemerintah dalam kaitannya untuk mewujudkan tujuan nasional.

Dan perkembangan situasi dan kondisi Pemerintahan Indonesia dewasa ini, tidak terlepas dari pengaruh dan maraknya tuntuan profesi. Salah satu dampaknya adalah terjadi perubahan mendasar terhadap tatanan pemerintahan, yaitu dengan adanya perubahan Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan tersebut mampu memberikan wewenang untuk daerah dalam peningkatan pembangunan.

Berdasarkan prinsip Undang-Undang di atas, pelaksanaan Pemerintah Daerah secara luas, nyata dan tanggung jawab di titik beratkan pada daerah Kabupaten dan Kota, bukan kepada Pemerintah Provinsi. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyelenggaraan pemerintah akan berjalan efektif dan efisien jika antara yang memberikan pelayanan dan perlindungan berada dalam jarak hubungan yang relatif dekat.

Dengan demikian, untuk dapat meraih keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, peranan aparatur pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten atau Kota adalah sangat penting. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan pembangunan memerlukan sarana penunjang yang bersifat fisik materil maupun non fisik atau spiritual seperti: jalan, jembatan keterampilan, dan partisipasi aktif dari segenanp bangsa indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Indonesia begitu kaya akan berbagai suku bangsa, dan memiliki 34 Provinsi. Salah satu Kota terbesar di Inonesia yaitu Bandung. Kota Bandung merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat, dan berfungsi sebagai kota pemerintahan, pendidikan, perdagangan jasa, dan pariwisata (Rencana Umum tata Ruang Kota Bandung 2001-2010). Dengan berkembangnya Kota sesuai

fungsi tersebut, maka jumlah penduduk pun turut meningkat sehingga kebutuhan akan sarana dan prasarana (infrastuktur) perkotaan juga meningkat, salah satu diantara nya adalah kebersihan dalam pengeloaan sampah.

Salah satu program pembangunan yang dilakukan di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Kota Bandung Nomor: 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan di wilayah Kota Bandung, yang lebih dikenal dengan istilah K-3. Program K-3 ini termasuk kegiatan pembanguan fisik, yaitu berupa pembangunan jaringan fasilitas umum berupa penghijauan dengan menanam pohon pelindung, tanaman tinggi, tanaman semak yang semuanya ditujukan untuk menciptakan keindahan Kota Bandung.

Dalam rangka pelaksanaan ketertiban, kebersihan dan keindahan maka salah satu pelayanan publik yang dituntut oleh pemerintah adalah pelayanan di bidang pengelolaan sampah. Bagi Kota Bandung, bidang pengelolaan sampah khususnya berupa limbah padat ditangani oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kota Bandung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Perusahaan Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat menajdi PD Kebersiahan Kota Bandung memberikan pelayaan bagi masyarakat Bandung. Pemerintah Daerah perlu menyediakan sarana yang refresntatif guna terselenggaranya pelayanan kebersihan yang profesional dan memadai. Untuk itu, dibentuklah sarana pengelola dan penanganan kebersihan secara tersruktur dan melembaga. Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung berkembang sejalan dengan kemampuan pemerintah daerah dan tutunan dari masyarakat Kota Bandung sendiri yang semakin hari semakin maju.

Pada dasarnya masyarakat merupakan makhluk individu yang saling bergaul dan berinteraksi. Berbagai aktivitas-aktivitas dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari adanya kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri seperti pengelolaan sampah. Dan untuk mewujudkan suatu lingkungan yang bersih, tidak akan terlepas kaitannya dengan masalah sampah yang dari ke hari semakin menumpuk. Makin menumpuknya volume sampah tersebut karena adanya aktivitas manusia yang semakin berkembang dan pembangunan yang juga dilakukan terus menerus, sehingga sisa atau bekas makanan dan sisa barang industri yang biasa kita kenal sebagai sampah akan semakin bertambah pula.

Pemerintah Kota atau Daerah membuat penerapan peraturan mengenai sampah yang menunjuk kepada sejumlah kegiatan-kegiatan yang mengikuti ke arah tujuan-tujuan, program dan hasil yang ingin dicapai oleh para pejabat pemerintah, instansi, lembaga, tokoh masyarakat, dan lain-lain.

Berbagai program kegiatan-kegiatan yang menyangkut sampah harus berlandaskan kepada ketentuan-ketentuan umum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD), misalnya: pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan sampah, pembangunan, dan pemelihatraan sarana air bersih yang dilakukan oleh individu, masyarakat, instansi, lembaga atau pemerintah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Implementasi mencakup kepada penerapan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan sosial yang dilakukan oleh berbagai aktor, dan individu agar program tersebut bisa berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya (Winarno, 2014: 148).Jika program kegiatan tidak dilakukan dan dikelola dengan baik, maka akan berdampak langsung kepada kerusakan lingkungan sekitar sehingga

pemerintah Kota Bandung khusunya kepala Desa Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung membuat suatu peraturan, kebijakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi adanya angka pelanggaran yang dilakukan individu, atau masyarakat dari tahun ke tahun meningkat secara bertahap.

Penerapan peraturan pemerintah daerah dan kebijakan publik akan berdampak langsung kepada pergeseran pola perilaku masyarakat atau individu yang asalnya tidak peduli menjadi peduli akan adanya kebersamaan untuk menjaga sistem sarana, pra sarana, lingkungan sosial dan keswadayaan, untuk mengatasi persoalan-persoalan masalah sosial secara bersama-sama. Kondisi sosial di masyarakat akan dapat teratasi dengan baik jika pengelolaan program peraturan pemerintah kota dan kebijakan publik harus secara transparan, bertahap-tahap dan berlaku secara adil di masyarakat dan tidak memihak kepada siapapun.

Peraturan kota dan kebjiakan publik tidak hanya semata-mata digunakan untuk menunjuk kepada perilaku individu saja, akan tetapi lebh kepada masyarakat, tokoh mayarakat, instansi dan lembaga pemerintahan harus sesuai dengan tindakan-tindakan sosial atau apa yang ingin dilakukannya supaya jelas tujuannya itu mau seperti apa agar program-program kegiatan dapat berjalan dengan baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Sampah merupakan konskuensi dari adanya aktiftas manusia. Dalam batasan ilmu pengetahuan, sampah (Inggris:Waste) adalah zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak terpakai lagi baik berupa bahan buangan yang berasal dari rumah tangga, maupun dari pabrik sebagai sisa proses industri. (Sopiah, 2011:148)

Setiap aktifitas manusia pasti akan mengahasilkan buangan atau sampah. Masalah sampah di Indonesia merupakan masalah yang rumit karena kurannya pengertian masyarakat terhadap akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh sampah, kuranya biaya pmerintah untuk mengusahakan pembuangan sampah yang baik dan memenuhi syarat.

Salah satu tujuan Pemerintah Kota dan Kepala Desa membuat peraturan dan kebijakan publik mengenai pengelolaan sampah khususnya di masyarakat adalah agar perilaku seorang atau individu tersebut menyadari akan pentingnya menjaga dan melindungi sarana pengelolaan sampah melalui tindakan sosial. Berdasarkan keputusan dan kesepakatan yang telah dibuat secara bersama-sama, seperti: Instansi, Lembaga, Pemerintah dan Tokoh Masyarakat harus berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar dan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku, misalnya: pengecoran, pembangunan sumur-sumur, penggalian dan lain-lain.

Respon sebagian masyarakat terhadap adanya penerapan-penerapan Peraturan Pemerintah Kota dan kebijakan publik tehadap pengelolaan sampah yang telah dibuat dan menyetujui secara bersama-sama oleh beberapa implementor atau pihak-pihak yang terkait masih bisa dikatakan tidak memperdulikan sama sekali adaya penerapan-penerapan kegiatan peraturan-peraturan dan kebijakan publik tersebut, dikarenakan tidak jarang masyarakat yang tidak bertanggung jawab tersebut melanggarnya sehingga kualitas pengelolaan sampah dan sarana prasarana penelolaan sampah kurang baik jika digunakan terus menerus oleh masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dampak adanya suatu pelanggaran, yang dilakukan oleh individu atau masyarakat yang tidak bertanggung jawab yang dapat menyebabkan timbulnya kerusakan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung dan kesehatan bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dalam membahas proposal penelitian ini penulis mengambil judul ***" Respon Masyarakat Terhadap Peraturan Walikota Mengenai Kebersihan (Studi Implementasi Kebijakan Publik Tentang pengelolaan Sampah di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung)"***

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan sosial yang terjadi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik menegenai pengelolaan sampah di Desa cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung, sebagai berikut:

1. Sebagian masyarakat belum mampu menjalankan penerapan kebijakan publik yang telah diterapkan di Desa Cipadung kecamatan Cibiru Kota Bandung.
2. Sebagaian masyarakat belum bisa menanggapi adanya penerapan peraturan Pemerintah Daerah tentang pengelolaan sampah di Desa Cipadung Kecamatan cibiru Kota Bandung.
3. Sebagian masyarakat belum menyadari akan pentingnya menjaga sarana prasarana kebersihan di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dentifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana respon masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan sampah di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru kota Bandung?
2. Bagaimana implementasi kebijakan publik tentang pengelolaan sampah di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung ?
3. Apa faktor pendorong dan penghambat pengelolaan sampah di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ada dua tujuan yang ingin dicapai yaitu: tujuan umum dan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penilitian ini adalah untuk mengungkap berbagai hal yang berhubungan dengan respon masyarakat setempat, dalam hal ini masyarakat Desa Cipadung terhadap pengelolaan sampah yang di atur oleh Peraturan Walikota Bandung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1.4.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini dilakukan untuk beberapa tujuan khusus:

1. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan sampah di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru kota Bandung.

2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan publik tentang pengelolaan sampah di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui respon masyarakat dan pejabat desa terhadap pengelolaan sampah di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki dua kegunaan. Kegunaanya yaitu, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah adalah, sebagai beriku:

   a. Menambah khasanah penelitian masalah sosial mengenai respon masyarakat terhadap Peraturan Walikota tentang pengelolaan sampah di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi dalam meningkatkan pemahaman tentang kebersihan dan pelestarian lingkungan.

2. Kegunaan Praktis

   a. Secara praktis, penelitian ini dapat memberi manfaat, yang nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan sampah.
   b. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan oleh masyarakat yang lingkungannya masih tidak peduli terhadap pengelolaan sampah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah tentunya harus berpedoman kepada teori-teori yag dikemukakan oleh para ahli khusunya sosiologi sebagai sumber yang diakui kebenarannya. Dalam hal ini jelas bahwa teori yang digunakan berkaitan dengan hubungan antara tindakan sosial individu akan menyebabkan adanya pengaruh penerapan implementasi peraturan Pemerintah tentang pengelolaan sampah di masyarakat dengan studi implementasi kebijakan publik tentang pengelolaan sampah di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung, merupakan aspek-aspek yang terpenting dalam keseluruhan proses perumusan kebijakan dan merupakan upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan sasaran tertentu.

Tetapi disini fokus kepada implementasi atau penerapan kebiajkan publik mengenai pengelolaan sampah yang ada di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung, serta mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Bandung dengan peraturan pemerintah kota nya yang terlebih dahulu telah disusun dan di rancang secara baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tujuan pemerintah kota membuat peraturan dengan studi kebijakan publik mengenai pengelolaan sampah di masyarakat hanya untuk meningkatkan kesadaran perilaku individu maupun masyarakat yang bertujuan untuk menjaga sarana dan pra sarana yang ada untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Sejalan dengan perkembangan zaman yang saat ini sedang terjadi di masyarakat dengan berbagai aktivitas masyarakat diberbagai bidang yang ditekuni, masing-masing tentu tidak terlepas dari suatu masalah sosial di masyarakat.

Max Weber dalam teori-teori tindakan sosialnya, ia mengartikan bahwa tindakan sosial di klarifikasikan ke dalam beberapa bagian, sebagai berikut:

1. Perbuatan *Zweckrational* (Tindakan Rasional)

Suatu perbuatan tindakan-tindakan yang *zweckrational* dapat dikatakan rasioanal jika pelakunya atau induvidu tersebut mengandalkan penggunaan beberapa usaha-usaha tertentu, ini perlu untuk mencapai suatu cita-cita itu sendiri. Tindakan *zweckrational* adalah bentuk tindakan rasional yang original dengan melibatkan pertimbangan secara rasional mengenai hubungan diantara suatu cita-cita dengan usaha mencapainya.

2. Tindakan *Werirational* (Tindkan Suatu Nilai)

Tindakan *Werirational* ini merupakan tindakan sosial yang tidak memandang bahaya atau kerugian hanya semata-mata untuk mempertahanakan suatu kehormatan sesorang atau individu untuk mencapai suatu nilai.

3. Tindakan yang bercorak pada nilai dan tadisi

Tindakan tradisi ini telah ditentukan oleh adat istiadat. Pelaku-pelaku atau individu melakukan sesuatu seperti yang ditentukan oleh tadisi tanpa memikirkan hubungan diantara cita-cita dengan beberapa usaha.

4. Tindakan Emosi

Tindakan emosi merupakan tindakan yang akibat dari reaksi emosi individu dan masyarakat itu sendiri. Perilaku refleksif adalah suatu contoh dari tindakan emosi seseorang. Tindakan sosial ini juga meliputi reaksi yang cepat dan tidak terkontrol akibat adanya suatu rangsangan (stimulus) di dalam dirinya sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Keempat tindakan sosial seperti yang telah dijalskan di atas, dapat dikenal sebagai tipe-tipe yang ideal. Weber mengakui bahwa tidak banyak tindakan, kalau ada yang seluruhnya sesuai dengan salah satu tipe ideal tersebut, misalnya tindakan tardisional mencerimkan suatu kepercayaan yang sadar akan nilai sakral atau tardisi-tradisi dalam suatu masyarakat.

Ini berarti tindakan sosial seperti yang telah dijelaskan di atas mengandung makna rasionalitas yang berorientasi kepada suatu nilai atau mencerminkan adanya penelitian yang sadar akan sebuah alternatif-alternatif, mencerminkan suatu keputusan bahwa tradisi-tradisi adat istiadat yang sudah mapan merupakan cara yang paling baik untuk menempuh tujuan yang telah dipilih secara sadar di antara tujuan-tujuan lainnya.

Pola perilaku individu masyarakat memunungkin bisa disesuaikan dengan beberapa kategori-kategori, misalnya: tindakan sosial, akan tetapi dalam situasi – situasi tersebut mungkin akan nampak berbeda, tergantung pada orientasi subjektif dari individu yang sedang terlibat. Tindakan subjektif dapat diartikan sebagai alat tujuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Perspektif Weber dalam tindakan sosialnya yang mempunyai sifat probalistik dan bukan sebagai suatu kenyataan empirik yang ada, terlepas dari individu-individu, seperti: hubungan sosial seluruhnya dan secara ekslusif telah terjadi karena adanya suatau probabilitas, dimana akan ada arah tindakan sosial di dalam masyarakat.

Suatu keteraturan sosial yang absah di dasarkan pada kemungkinan bahwa seperangkat hubungan sosial akan di arahkan kepada suatu kepercayaan akan validitas keteraturan tersebut. Realitas akhir yang menjadi dasar satuan-satuan sosial yang lebih besar adalah tindakan sosial yang dilakukakan oleh seseorang, individu atau masyarakat, karena mencakup kepada kesadaran akan tindakan sosial yang mungkin akan mendapat reaksi –reaksi dari orang lain dan tanggapan yang berbeda-beda.

Tindakan sosial dimaksud untuk semua perilaku individu atau masyarakat yang sepanjang waktu akan bertindak dengan memberikan arti subjektif itu sendiri kepada individu lain. Tindakan sosial ini di sebut sebagai aksi sosial karena arti subjektif dihubungkan dengan individu yang sedang bertindak atau ingin bertindak dengan memperhitungakan terlebih dahulu dari perilaku orang lain yang di arahkan kepada suatu tujuan yang ingin dicapainya secara baik.

Kenyataan sosial dimasyarakat hanyalah satu nama yang menunjuk kepada sekumpulan-sekumpulan individu, seseorang atau masyarakat yang mempunyai perilaku secara subjektif. Individu, manusia dan masyarakat mempunyai perilaku yang subjektif di dalam dirinya sendiri yang disertai dengan tindakan sosial untuk mencapai beberapa tujuan ynag diinginkan atau dicapainya. Perilaku subjektif adalah adalah untuk dapat memahami pola perilaku orang lain di dalam masyarakat karena manusia memiliki roh, jiwa, akal, dan naluri agar orang dapat memahami orang lain dengan tepat.

Manusia melakuakan sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukannya dan ditunjukan untuk mencapai apa yag mereka inginkan. Setelah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

memilih sasaran, mereka memperhitungkan keadaan, kemudian memilih tindakan sosial. Dalam kehidupan sosial dengan tuhan ataupun dengan berbagai jenis tindakan sosial, tindakan sosial tersebut diperoleh melalui proses belajar, baik secara formal maupun informal.

Tindakan sosial ini menunjukkan bahwa manusia akan selalu aktif dan tidak bisa diam dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat. Max Weber mengemukakan bahwa tindakan sosial merupakan kegiatan-kegiatan dari segala perilaku individu atau masyarakat yang memiliki tujuan yang ingin dicapainya dengan melalui tindakan sosial tersebut di dalam lingkungan masyarakat.

Tindakan sosial manusia di dalam kehidupan sehari-hari muncul dari adanya suatu kesadarannya dalam situasi lingkungan yang mengitarinya (Syam, 2012: 70). Tindakan sosial amat penting dibidang ilmu kajian sosiologi, karena tindakan sosial tersebut merupakan suatu fenomena-fenomena yang paling dasar di dalam kehidupan masyarakat secara langsung dan tanpa paksaan dari siapapun. Individu atau masyarakat yang bertindak melalui tindakan sosialnya di masyarakat yang memilki tujuan yang jelas, suapaya keinginan tersebut dapat tercapai dengan baik dan hanya dapat di mengerti secara subjektifnya saja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG